

DAFTAR RUJUKAN

- Afifudin. *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- al-Bujairimi, S. b. *hasiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*. Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- al-Ghazali, A. *Al-Mustafa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- al-Kuwait, W. a.-A.-S.-. *Al-Mausu'at al-Fikhiyyah*. Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, t.t.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-'ilmiyyah, 2006.
- al-Zuhayli, W. *ushul al-Fikih al-'Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- al-Zuhayli, W. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Astuti, Budi, W. R., & Heltaji, H. Analisa Yuridis terhadap Laporan Akuntansi Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di Tangerang Selatan. *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, (2023): 172-182.
- Az Zakiyyah, N. A. Infrastructure and Poverty: State budget Effect Analysis with Panel Model. *JAMPE (Journal of Asset Management and Public Economy)*, (2024): 45-47.
- Badan Pengembangan Nasional. *Panduan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2019.
- Budiman, A. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Budiyanti, E. *Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Menjelang Akhir Tahun 2023*. Isu Sepekan Bidang Ekuinbang Komisi XI DPR RI, t.t.
- Digdoweseiso, K. *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitann Universitas Nasional, 2019.
- Farida, A., & Nasichin. Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transdental). *Jurnal Hukum Transdental*, (2018): 231.

- H., H. Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, (2022): 1030-1037.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group, 2018.
- Hadiansyah, Y. Efisiensi Anggaran dalam Evaluasi Pembangunan Analisis Fungsi Organisasi BPKAD NTB, Opini Publik di Media Sosial X dan Rekomendasi Kebijakan. *Jurnal of Economic, Management, and Accounting*, (2025): 122.
- Hantika, R. C. *Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Harmadi, S. *Keuangan Negara dan Fiskal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hayati, J. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan pembangunan Infrastruktur di Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.
- I, S. *Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Value for Money*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ichsan, M., & Yudiatmaja, F. Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Anggaran Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, (2020): 123-134.
- Idrus, & Musyahid, A. Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fiqih: Tasarruf al-Imam manutun bil Maslahah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, (2021): 123-137.
- Idrus, M. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Iqbal, M. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Ismatullah, D., & Gatara, S. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Jatmiko, B., Haya, B., & Utami, T. Enhancing Value for Money Performance in Local Government Organizations: The Role of Public Financial Accountability and Internal Control. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, (2022): 245.

- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. Konsep dan Teori Pembangunan. *Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, (2016): 7.
- Khallaf, A. *Al-Siyasat al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1977.
- Kuntoro, M. Pengalihan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes. *Jurnal of Accounting and Finance*, (2019): 64.
- Kusumaatmadja, M. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Lubis, S. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1987.
- M, M. Maqasid al-Syari'ah li al-Maslahah. *Journal Al-'Adl*, (2008): 64-84.
- M., D. Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, (2025): 12-29.
- Mallongi, A. A. Kebijakan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Negara di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Siyasaah Maliyah. *Jurnal El-Thawalib*, (2025): 223.
- Ma'luf, L. *Munjid fi al0;ughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mankiw, & Gregory, N. *Principles of Economics*, Alih Bahasa: Munandar. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Manullang, S., & Suyatno. Aspek Hukum Investasi Infrastruktur: Kemitraan Publik-Privat dan Kerangka Regulasi. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, (2024): 1194.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Muhammad. (2011). *Metode Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Natsir, & Kahfi, M. K.. Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, (2025): 141-162.
- Noer, D. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Nuraeny, H. Pengiriman Tenaga Kerja Migran sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2015): 501-518.
- Nurhuda, Sutrisno, & Galuh. Analisis Risiko Keterlambatan Waktu pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan SPBU (Studi Kasus di Kabupaten Bantul Yogyakarta). *Bangun Rekaprima*, (2019): 19.

- Observasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek, pada 17 November 2025.
- Observasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, pada 29 Oktober 2025.
- Observasi di ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari, pada 20 November 2025.
- Oktaviani, V. R. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, (2024): 9883.
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024*. Trenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2024.
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025*. Trenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2025.
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025. *Dokumen Resmi Perangkat Daerah*, (2025): 37-42.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran II.
- Perbaikan Jalan Kedunglurah-Gandusari Trenggalek Diundur 2026*. (2025, Oktober 10). Retrieved November 26, 2025, from Kabar Trenggalek: https://kabartrenggalek.com/perbaikan-jalan-kedunglurahgandusari-trenggalek-diundur-2026-warga-keluhkan-kondisi-rusak#google_vignette
- Poerwadarminta, W. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Pye, L. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Rais, L. Keadilan Sosial dalam Pembangunan: Tinjauan Literatur terhadap Kebijakan Pembangunan dengan Adanya Efisiensi Anggaran dari Pusat. *Papua Jurnal of Sociology*, (2025): 52.

- Reza, & Devi. Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal of Economic Education*, (2023): 1-15.
- Sadikin. Peran Pemerintah daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda. *Jurnal Peqquruang: Conference Series*, (2021): 834.
- Safriadi. *Maqashid Syari'ah dan Masalahah*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Saidi, M. D. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Salle, A., & Layuk, P. K. *Keuangan Negara & Daerah*. Jayapura: Penerbit Universitas Cendrawasih, 2021.
- Salman, & Iqbal, M. Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran Ditinjau dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*. (2024).
- Sari, D., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, (2018): 38-43.
- Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sen, A. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Setiawan, Z., & Irwansyah. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, (2024): 68.
- Suhaimi, & Syalafiyah. Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law Jurnal Siyasah*, (2025): 215.
- Suhartini. Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Jurnal de jure*, (2019): 1.
- Surri, D. A., & Alfianto, I. Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek infrastruktur di Indonesia dan Strategi Manajemen. *Journal of Sustainable Construction*, (2025): 33-35.
- Sutedi, A. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tarigan, Antonius, E. P., & Lastria, N. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, (2013): 29.

Tugas dan Fungsi. Retrieved November 26, 2025, from Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek : <https://dinaspupr.trenggalekkab.go.id/hal/tugas-dan-fungsi>

Tugas Pokok dan Fungsi. Retrieved November 26, 2025, from Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek : <https://bappedalitbang.trenggalekkab.go.id/>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Wahab, S. A. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Walizi, H. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah di Bappeda Muara Enim. *Integrative Perspective of Social and Science Journal*, (2025): 1713.

Wawancara dengan Bapak Aris selaku staf Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, pada 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Latief Amin, warga RT 07 RW 03 Desa Melis, Kecamatan Gandusari, pada 18 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Mukti, selaku staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek, pada 17 November 2025.

Yullianti, D. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi terhadap Pelayanan Publik. (2025): 37.